

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian diambil dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata "cerai" yang berarti perpisahan, mengenai bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan.¹ Sedangkan "Perceraian" dalam pandangan ahli fiqh dikatakan talak atau furqah. Talak yang berarti membuka ikatan, "membatalkan perjanjian". Sedangkan Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.² Kemudian perceraian dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهِيَ حَاِيضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَا جِغْهَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَبِئْسَ الْوَعْدَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a ia menceraikan istrinya sedang kotor (menstruasi) di masa Rasulullah saw., lalu Umar bin al-Khattab r.a. bertanya kepada Rasulullah: "Suruhlah ia rujuk kepada istrinya. Ia harus menjaga istrinya sampai suci kembali, dan suci kembali. Setelah itu baru kalau ia memelihara isterinya terus, boleh, dan kalau ia mau menceraikannya, juga boleh, asal ia belum

¹ Mahyudin Syaf, *Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam*, (Bandung, Araz) hlm 102.

² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 156

*bersetubuh dengannya. Itulah masa yang tepat dimana Tuhan memperbolehkan menceraikan isterinya”.*³

Dan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru [Q.S. At-Thalaq : 1].*⁴

Sedangkan menurut aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa perceraian dibolehkan bila terdapat alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁵

Ketentuan yang terdapat pada ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang Peradilan

³ Abu abdillah Muhammad. *Shahih bukhori*, terjemahan Zainudin Hamidy dkk, (Jakarta Widjaya, 1984) Hadits ke 1615.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, P.T Karya Toha Putra, Semarang 2002, Q.S At-Thalaq:1.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Agama dalam Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian, ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 19.⁶

Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua ayatnya.⁷

Dari pengertian talak yang sudah di uraikan diatas, maka jelas bahwa talak merupakan sebuah keputusan yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dengan alasan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975 Pasal 19.⁸

Namun yang terjadi saat ini, sangat banyak permasalahan rumah tangga diluar syarat perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan seperti perselingkuhan, masalah anak, masalah ekonomi, masalah seks, dan permasalahan lainnya yang juga dapat menjadi alasan terjadinya perceraian.

Seperti dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji putusan perkara No. 2304/Pdt. G/2013/ PA. Mlg yang mengajukan alasan perceraian dengan alasan diluar syarat alasan perceraian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975 Pasal 19. Dalam putusan ini telah terjadi perceraian yang

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975

⁷ Abdul, Gani, Abdullah. *Pengantar kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gemma Insan press, Jakarta, 1994, hal 111-112

⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, hlm 67.

disebabkan bahwa pihak istri tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh pihak suami, meskipun pihak suami telah memberikan semua penghasilannya, selain dari pada itu pihak istri sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah.

Dari kedua alasan yang diajukan oleh perkara No.2304/Pdt.G/2013/PA.Mlg sangatlah jelas bahwa kedua alasan tersebut tidak termasuk kedalam alasan perceraian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19. Namun dalam perkara yang diambil dalam penelitian ini, Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dengan mengalihkan alasan perceraian kepada salah satu syarat perceraian yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1974 pasal 19 poin (f) yang berbunyi *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.⁹

Oleh karena itu, demi memahami dasar hukum putusan hakim terhadap perkara ini baik dari hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengetahui bagaimana proses pembuktian perceraian dengan alasan diluar syarat perceraian dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Penafsiran Hakim dalam memutus Perkara perceraian dengan alasan Perselisihan di Pengadilan Agama Makang (Studi Perkara Nomor:**

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

No.2304/Pdt.G/2013/ PA.Mlg)” yang akan dipaparkan dan dianalisis dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicari melalui penelitian. Panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada obyek yang diteliti.¹⁰ Rumusan masalah juga merupakan suatu upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dapat menjadi jawabannya atau pernyataan yang lengkap secara rinci dan jelas mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.¹¹

Berdasarkan pada keterangan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam pembuktian dan memutuskan perkara gugatan perceraian ?
2. Bagaimana landasan hakim dalam Menafsirkan poin (f) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dalam penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang diterapkan dalam memutuskan perkara No.2304/Pdt.G/2013/ PA.Mlg ?

¹⁰ Sugiyono. *Metode penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2016 hal 290.

¹¹ <http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>. 19 Oktober 2011. 11.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama dalam pembuktian dan memutuskan perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Malang
2. Mengetahui dan menganalisis penafsiran hakim terhadap Poin (f) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Pasal 19 dalam penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diterapkan dalam memutus putusan perkara No.2304/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian atau penelitian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan dan kajian tentang penafsiran hakim terkait cerai gugat dengan alasan perselisihan, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat Undang-Undang perkawinan mengenai kumulasi alasan perceraian.

- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan Syariah al-Ahwal al-Shakhshiyyah Universitas Muhammadiyah Malang
- c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, akan penulis uraikan beberapa skripsi karya para sarjana syariah yang mempunyai tema sama tetapi perspektif bahasanya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi Ridwan lulusan tahun 2004 yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/ptd. G/2002/PA Semarang yang meneliti tentang Pelanggaran Taklik Talak”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa taklik talak merupakan hasil dari budaya masyarakat pra Islam yang dilakukan oleh pihak istri untuk berlindung atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para suami. Menurut pandangan penulis, taklik talak yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan yang diatur dalam KHI kurang dapat memberikan jawaban dan penjelasan padahal mengenai kemaslahatan cerai gugat yang berkaitan dengan taklik talak sangat dominan disetiap acara persidangan.

Dalam kasus perkara ini tergugat telah melanggar taklik talak karena pada saat akad nikah tergugat mengucapkan janji taklik talak. Namun dalam gugatan penggugat hakim pengadilan agama Semarang menetapkan talak satu dari tergugat dengan *iwadh* Rp. 10.000.¹²

2. Skripsi Mudrik lulusan tahun 2001 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga yang meneliti tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bias dijadikan alasan putusnya suatu perkawinan. Artinya seorang istri boleh melakukan gugatan perceraian karena suami berjudi, karena:

- a. Dilarang oleh Allah
- b. Berimbas pada anak dan keluarganya.

Putusan tersebut memutuskan talak *bain* antara tergugat dan penggugat karena terjadinya *syiqoq* yang disebabkan karena judi.¹³

3. Skripsi Jikronah lulusan tahun 2000 dengan judul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/pdt. G/PA

¹² Ridwan, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Semarang tentang Pelanggaran Taklik Talak*”, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2004.

¹³ Mudrik, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2001.

Demak yang meneliti tentang Cerai Gugat Istri karena Tidak Terpenuhi Nafkah Batin.” Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa suami istri wajib memberikan bantuan lahir satu dengan yang lainnya demi menegakkan rumah tangga, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka salah satu pihak dapat minta cerai melalui hakim pengadilan agama. Dalam putusan perkara ini, majelis hakim memberikannya putusan cerai atau gugatan istri dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batin karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *taklil talak*.¹⁴

4. Skripsi yang disusun oleh Siti Sangadah lulusan tahun 2006 dengan judul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/pdt.G/2003 yang meneliti tentang Cerai Gugat karena seorang Suami telah Menderita penyakit Stroke.” Dalam penjelasan skripsi ini telah dijelaskan bahwa seorang istri telah menggugat cerai kepada suaminya, karena suaminya telah mengalami penyakit cacat fisik dan mental dan tidak dapat berbicara (stroke).

Akhirnya pihak Pengadilan Agama Rembang memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan jalan *Fasakh*, artinya antara penggugat dan tergugat telah putus ikatan satu sama lainnya. Dalam analisis penelitian ini menjelaskan bahwa penyakit stroke

¹⁴ Jikronah, “ *Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/pdt.G/PA Demak tentang Cerai Gugat Istri karena Tidak Terpenuhi Nafkah Batin*”, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2000.

dapat dijadikan untuk alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 yakni karena mendapat cacat badan.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu hanya mengungkapkan perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 116 . Dengan demikian penjelasan tersebut di atas tampak jelas penelitian terdahulu belum mengungkapkan dan menganalisis penafsiran hakim yang diterapkan dalam memutus putusan perkara.

Skripsi yang disusun sekarang ini hendak berupaya menganalisis penafsiran hakim terhadap syarat perceraian yang tercantum dalam (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dalam penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menjadi landasan Hakim untuk memutus suatu perkara perceraian.

F. Metode Penelitian

Keberhasilan dan kesuksesan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.

¹⁵ Siti Sangadah, “ *Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/pdt.G/2003 tentang Cerai Gugat karena Suami Menderita Stroke*”, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2006.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yaitu data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber data pertama.¹⁷ Sumber data yang dimaksud oleh penulis adalah subyek dari suatu data yang telah didapatkan. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁸

Data primer dalam skripsi ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Malang No.2304/Pdt.G/2013/ PA.Mlg. tentang perceraian karna alasan perselisihan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 13.

¹⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT Raja Grafindo persada, cet.9, 1995, hlm.85

¹⁸ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT Raja Grafindo persada, cet.9, 1995, hlm.85.

b. Data Sekunder

Yaitu tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian. Dalam hal ini adalah :

- i. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP). No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Inpres RI No. 1 tahun 1971 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan- peraturan yang Relevan.
- ii. Buku – buku yang relevan diantaranya *Fiqih Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif* serta buku–buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis pengumpulan data yang digunakan oleh peniliti adalah dokumentasi. Yaitu berupa arsip kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi dan kebutuhan atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu.¹⁹

Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset (Penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Pengadilan Agama Malang Dalam hal ini berupa salinan putusan perkara No.2304/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang perceraian karna alasan perselisihan.

¹⁹ Komaruddin, Op cit, hlm.62

Selain dari pada itu dilakukan suatu penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk memperkuat dalil dalam analisis ini terhadap putusan pengadilan tersebut.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha-usaha untuk memberikan pandangan teoritis terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan demikian analisis data tersebut ditujukan kepada data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala yang bena-benar berlaku.²⁰

Kemudian data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Induktif yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus atau spesifik²¹ dalam hal ini adalah dari studi putusan perkara No.2304/Pdt.G/2013/ PA.Mlg. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum²² dalam hal ini penyelesaian perkara perceraian dengan diluar alasan syarat perceraian secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini berkaitan dengan penafsiran hakim dalam memutus suatu alasan perceraian.

²⁰ Sugiyono. *Metode penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2016 hal 245.

²¹ *Ibid*, hlm. 246.

²² *Ibid*, hlm. 246.

Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Malang dalam putusan perkara tentang perceraian dengan alasan diluar syarat perceraian sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembagian secara global.

Bab II Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama. Dalam bab ini menerangkan peran Hakim dalam menyelesaikan perkara, landasan Hakim dalam memutus perkara dan kewenangan Hakim dalam menafsirkan dan mengkontruksi hukum

Bab III Analisis Penafsiran Hakim Dalam Menafsirkan Poin (F) Yang Tercantum Dalam Peraturan Pemerintah (Pp) No. 1 Tahun 1975 Pasal 19 Yang Diterapkan Dalam Memutus Putusan Perkara No. No.2304/Pdt.G/2013/PA. Mlg.

Dalam bab ini menerangkan pertimbangan dan landasan hakim dalam putusan pengadilan Agama Malang perkara NO.2304/Pdt.G/2013/PA. Mlg, analisis penafsiran hakim Pengadilan Agama Malang terhadap putusan perkara No.2304/Pdt.G/2013/PA. Mlg. Mlg dengan alasan perselisihan.

Bab IV Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penafsiran hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No.2304/Pdt.G/2013/PA. Mlg.Tentang perceraian dengan alasan perselisihan.